BAB I
PENDAHULAUAN

1.1. Latar Belakang KKL

Fasilitasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012 merupakan tugas dari Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku unsur pemerintahan yang berperan sebagai penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban.

Dalam penyelenggaraan Pilkada tentu diperlukan sebuah pemantauan dari badan Pemerintah tentang bagaimana pelaksanaan Pilkada itu berlangsung dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktifitas yang sedang dilaksanakan, kegiatan pengumpulan data yang relevan secara sistematis dan kontinyu yang berkaitan dengan proses tertentu tanpa mengadakan pertimbangan terhadapnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemantauan adalah suatu kegiatan untuk melihat serta mencatat suatu kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan suatu program secara cermat dan teratur.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan pemantauan adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penyajian data/informasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/evaluasi. Pemantauan bersifat memotret apa adanya (lugas), sesuai dengan data yang ada tanpa rekayasa dan tidak melakukan penilaian atau koreksi apapun. Jadi apabila dijumpai penyimpangan-penyimpangan cukup dicatat sebagai bahan untuk melaksanakan tindakan koreksi.

Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat melakukan pemantauan ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012 dan mendata seberapa besar kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,

Biro Pemerintahan Umum juga melakukan sebuah evaluasi/penilaian memberikan informasi dari hasil pemantauan tersebut tentang kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Evaluasi atau penilaian berarti tindakan untuk menentukan nilai sesuatu. Dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Yang dimaksud dengan proses sistematis ialah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program dianggap selesai.
2. Di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam hal ini berkaitan dengan perilaku, penampilan, hasil ulangan atau pekerjaan rumah, nilai semester dan sebagainya.
3. Dalam setiap kegiatan evaluasi, tidak lepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal ini karena setiap kegiatan penilaian memerlukan suatu criteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai.

Objek yang menjadi bahan evaluasi setelah pemantauan yang dilakukan Biro Pemerintahan Umum adalah kesadaran masyarakat pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012.

Tingkat partisipasi pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya 2012 dinilai tinggi. Data KPU Kota Tasikmalaya menyebutkan, angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Tasikmalaya mencapai 81,40% atau sebanyak 365,212 dari total 448.729 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara, sebanyak 83. 527 atau 18,6 % suara tidak digunakan.

Hasil tersebut lebih tinggi dibanding dengan pemilihan legislatif di tingkat Jawa Barat dan nasional. Angka tersebut merupakan angka tertinggi partisipasi pilkada di Indonesia yang sedang menurun antara 60%-75%. Selain itu, dinilai lebih tinggi ketimbang dengan pemilihan kepala daerah di wilayah lainnya.

Hal tersebut menurut penulis bisa dikatakan sebuah prestasi, ketika partisipasi masyarakat menurun di tingkat Jabar maupun nasional, namun pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya malah meningkat.

Penulis berpendapat bahwa fasilitasi Biro Pemerintahan umum Setda Jawa Barat pada Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2012 sangat dibutuhkan agar dapat membantu pelaksanaan Pilkada, karena fasilitasi Pilkada merupakan cara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pada fasilitasi Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Biro Pemerintahan umum melakukan pemantauan ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) tentang bagaimana kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Untuk itu penulis berinisiatif untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat. Hal yang mendasari kami untuk melakukan KKL di Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat adalah ketertarikan tentang bagaimana peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Jawa Barat dalam fasilitasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya tahun 2012.

Adapun yang menjadi tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini adalah untuk mengetahui Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya. Melalui Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan masukan dalam fasilitasi Pilkada khususnya yang di laksanakan di Provinsi Jawa Barat dan luar Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh

penulis di atas, maka penulis mengambil judul mengenai **"Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012".**

1.2. Kegunaan KKL

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan membawa manfaat baik khususnya bagi diri penulis sendiri maupun bagi orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis KKL ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012.
2. Secara teoritis penulis megharapkan Laporan Kerja Lapangan (KKL) ini dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi teman-teman penulis di Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Mengenai Peran Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012.
3. Secara praktis penulis Mengharapkan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bagaimana Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012. Serta diharapkan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Biro Pemerintahan Umum

Sekretariat Dearah Provinsi Jawa Barat dalam Fasilitasi Pilkada yang di laksanakan di Provinsi Jawa barat.

1.3. Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada Laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian, penulis dalam melakukan penulisan laporan KKL ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Burhan Bungin yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantatif". Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai berikut :

> "Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai *variable* yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun *variable* tertantu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Bungin, 2001:124)".

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif menggambarkan tentang Peran Biro Pemerintaan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Fasilitasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012 dalam melakasanakan program kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.4. Lokasi dan Waktu KKL

Penulis melaksanakan KKL di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 21. Penjadwalan penelitian kuliah kerja lapangan sampai dengan pengumpulan laporan yang terdiri dari:

1. Penyusunan rancangan judul, bulan Mei 2012;
2. Penyusunan usulan penelitian dengan arahan pembimbing, bulan Juni 2012;
3. Pengumpulan data di lapangan, bulan Juli 2012;
4. Analisa data yang diperoleh dari lapangan bulan Agustus - September 2012;
5. Penyusunan laporan KKL bulan September - Oktober 2012;
6. Pengumpulan laporan KKL November 2012;
7. Persiapan seminar laporan KKL Desember – Januari 2012-2013;
8. Seminar hasil KKL Februari 2013.

Tabel 1.1

Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

Waktu Kegiatan	2012								2013	
	Mei	juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Sosialisasi KKL	■									
Observasi Lokasi KKL	■	■	■							
Pengajuan Judul dan Lokasi KKL		■								
Pengajuan Surat ke Tempat KKL		■	■							
Pelaksanaan KKL			■							
Penyusunan Laporan KKL				■	■	■	■			
Pengumpulan Laporan KKL							■			
Persiapan Seminar KKL								■	■	
Seminar Hasil KKL										■